

PENENTU SEKTOR UNGGULAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Agus Tri Basuki¹ dan Utari Gayatri¹

¹ Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Kasihan Bantul DIY 55183 Telepon +62 274 387656
E-mail: agustribasuki@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor dominan di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dengan menggunakan pendekatan analisis MRP, Shift Share, LQ, dan tipologi Overlay dan Klassen dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sektor pertanian dan industri manufaktur yang merupakan pertumbuhan sektor dominan. Selain itu, sektor ini juga menunjukkan peningkatan struktur pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat sebagian besar penduduk di wilayah kabupaten OKI masih terlibat dalam pertanian, sehingga pertanian memiliki pertumbuhan yang luar biasa daripada sektor ekonomi lainnya. Selain itu, industri manufaktur juga merupakan sektor ekonomi dengan pertumbuhan yang luar biasa. Industri manufaktur ini di antaranya industri Kemplang dan Pempek yang banyak berkembang di provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten OKI.

Kata kunci: potensi ekonomi, sektor unggulan, pembangunan ekonomi, struktur ekonomi

Abstract: This study aims to identify the dominant sector in Komering Ogan Ilir. By using the analytical approach of MRP, Shift Share, LQ, Overlay and Klassen typology can be concluded that the economic potential held Komering Ogan Ilir is the agricultural sector and the manufacturing industry which is the dominant sector growth. In addition, the sector also showed an increase of the structure of economic growth. It is given that most residents in the area of OKI regency is still engaged in agriculture, so agriculture has an outstanding growth of other sectors. In addition, the manufacturing industry has also an outstanding growth among manufacturing Kemplang and Pempek industries that thriving in South Sumatra Province and District OKI.

Keywords: economic potential, the leading sectors, economic development, economic structure

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk mening-

katkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pemba-

ngunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan kegiatan sektor ekonomi yang dominan (Syafrizal, 1999).

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditetapkan di suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi (masalah, kebutuhan, dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan (Arsyad, 1999). Perencanaan pembangunan ekonomi yang baik membutuhkan suatu perencanaan yang teliti dalam menggunakan sumber-sumber daya publik dan swasta serta sektor-sektor yang berperan dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang terarah, pembayar pajak, dan penanaman modal serta penciptaan iklim dari kegiatan ekonomi yang baik maka pembangunan suatu daerah dapat dikatakan sebagai satu unit kesatuan yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi dan pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Daerah yang otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat serta merencanakan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut,

daerah perlu memiliki konsep utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang memuat dasar filosofi, visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, disadari bahwa pelaksanaan pembangunan daerah bukan merupakan tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak dan masyarakat kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Perkembangan pendapatan riil yang diterima oleh penduduk ditunjukkan oleh Pendapatan Regional per kapita. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran di suatu wilayah. Dalam hal ini, PDRB per kapita juga meruakan gambaran nilai tambah penduduk karena aktivitas antara PDRB per kapita dan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dihitung atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam hal ini, perhitungan menggunakan tahun 2000. Kegunaan PDRB atas harga konstan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun, sedangkan kegunaan PDRB atas harga berlaku untuk melihat besarnya struktur perekonomian dalam satu daerah atau wilayah.

Dilihat dari pendapatan per kapita atas harga konstan kabupaten Ogan Komering Ilir

dengan migas dan tanpa migas selama kurun waktu 2003-2007 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 sebesar Rp3.208.988 menjadi Rp3.322.864 pada tahun 2004 atau meningkat 3,55 persen, sedangkan pada tahun 2005 pendapatan per kapita sebesar Rp3.472.639 meningkat 4,51 persen. Peningkatan yang sama juga terjadi pada tahun 2007 sebesar Rp3.800.831 meningkat 4,51 persen dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar Rp3.636.894.

Pembangunan di kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami perkembangan yang semakin baik, hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi kabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun ke tahun, khususnya di tahun 2007 peningkatan perekonomian tidak hanya dirasakan di tingkat regional tetapi juga pada tingkat nasional. Adanya peningkatan ini ditunjukkan dengan kenaikan angka pertumbuhan ekonomi yang terjadi di seluruh lapangan usaha atau sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Ogan Komering Ilir yang diukur dengan PDRB menunjukkan bahwa perkembangannya cukup stabil.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis terdorong untuk menganalisis dan mengkaji lebih lanjut mengenai sektor-sektor ekonomi di kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat ruang lingkup pembangunan ekonomi daerah sangat luas maka penulis membatasi pembahasan masalah pada sektor-sektor ekonomi yang ada di kabupaten Ogan Komering Ilir dan data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan dalam pembangunan daerah di kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan beberapa alat analisis

alternatif, dan untuk mengetahui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi berdasarkan kondisi PDRB di kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Perencanaan adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang (*Conyers & Hill, 1994*).

Tujuan perencanaan menurut Hatta adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Sedangkan menurut Widjojo Nitisastro, perencanaan pada dasarnya berkaitan dengan dua hal yaitu *pertama* adalah penentuan pilihan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. *Kedua*, pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien guna mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan kriteria tertentu yang sebelumnya harus dipilih terlebih dahulu.

Perencanaan ekonomi terdiri atas sedereatan fungsi kewenangan masyarakat dalam menggunakan sumber daya ekonomi secara optimal untuk mencapai suatu tatanan yang lebih baik. Dengan demikian, perencanaan ekonomi merupakan pengaturan dan pengarah atas suatu kegiatan ekonomi melalui tindakan yang terkoordinasi secara sistematis oleh badan perencanaan pusat dengan tujuan tertentu dalam periode waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta

dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab (Kuncoro, 2004).

Dari sudut pandang ekonomi, perlu adanya perencanaan pembangunan ekonomi adalah agar alokasi sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang lebih efisien dan efektif sehingga pemborosan dapat dihindari, perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkesinambungan, dan tercapainya stabilitas ekonomi dalam menghadapi globalisasi.

Sumber Daya Perencanaan untuk Pembangunan Daerah. Kebanyakan orang mengetahui bahwa hasil dari suatu pertumbuhan ekonomi adalah pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, peningkatan kekayaan dan pendapatan, dan sebagainya akan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Namun demikian, disadari bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana suatu masyarakat menciptakan lingkungan fisik atau peraturan yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1999). Maka pemerintah daerah menggunakan berbagai sumber daya yang utama dalam pembangunan daerahnya: 1) Lingkungan Fisik sebagai Sumber Daya Perencanaan, 2) Lingkungan Regulasi sebagai Sumber Daya Perencanaan, 3) Lingkungan *Attitudinal* sebagai Sumber Daya Perencanaan.

Keputusan yang diambil sektor swasta mengenai investasi atau relokasi tidak hanya didasarkan pada perkataan kasar para investor yang tidak dimengerti oleh masyarakat atau penduduk suatu daerah. Dalam kenyataannya, keputusan akhir akan sangat dipengaruhi juga oleh semacam *feeling* atau *judgment* para investor mengenai reaksi masyarakat daerah sebagai calon lokasi investasi karena dunia usaha tidak akan memilih suatu

daerah tertentu karena penduduknya.

Pembangunan Daerah di Era Otonomi. Ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri untuk lebih memajukan dan melakukan pembangunan di daerah masing-masing.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 "Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka masing-masing daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan proses pembangunan daerahnya. Antara lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan. Maka setiap daerah harus mampu berkreasi dan mengoptimalkan *outputnya* guna meningkatkan kemajuan dan kemandirian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Aparatur pemerintah yang berkemampuan, sehingga masyarakat secara nyata memperoleh manfaat dari adanya otonomi. Agar tujuan dan usaha pembangunan daerah

dapat berhasil dengan baik maka pemerintah daerah perlu berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan daerah juga merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Otonomi Daerah. Istilah otonomi (*autonomy*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *auto* berarti sendiri dan *nomos* berarti hukum. Otonomi itu sendiri mengandung arti pemberian wewenang dalam mengambil keputusan dan pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, otonomi daerah adalah penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat pada negara kesatuan maupun kesatuan maupun negara federal. Sedangkan daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah pada hakekatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan strategis, serta pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah memerlukan kesiapan pemerintah daerah di segala bidang, terutama kesiapan

sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, guna memberdayakan potensi daerah yang ada (Suwandi, 2000).

Otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang didasarkan pada prinsip-prinsip: *Pertama*, negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan oleh karenanya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah tentu dalam kerangka negara kesatuan,

Kedua, di dalam negara kesatuan tidak dibenarkan adanya negara di dalam negara,

Ketiga, mengingat adanya perbedaan dalam tingkat perkembangan antardaerah, maka pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan permasalahan atau urusan yang dihadapi serta tingkatan perkembangan daerah.

Keempat, Otonomi daerah itu bukan merupakan tujuan akhir karena adanya tujuan adanya daerah otonomi adalah sama dengan tujuan negara, dan otonomi merupakan cara untuk mencapai tujuan itu. Dalam rangka itu otonomi daerah harus menguntungkan bagi masyarakat di daerah yang bersangkutan dan bagi bangsa dan negara kesatuan secara keseluruhan.

Dalam rangka otonomi daerah sangat jelas bahwa kepemimpinan dari pemerintah pusat memerlukan visi untuk lebih memajukan perekonomian suatu daerah. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup, yaitu:

Di bidang politik, otonomi daerah merupakan hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, sehingga dapat dipahami sebagai sebuah proses mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Di bidang ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Di bidang sosial dan budaya, otonomi harus dapat dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara dinamika kehidupan di sekitarnya.

Otonomi daerah bukan diartikan hanya sebagai proses administrasi politik yang berupa pelimpahan wewenang pembangunan dan pemerintahan kepada pemerintah daerah, melainkan lebih merupakan suatu proses pembangunan daerah sendiri dengan segala rangkaian komitmen dan tanggung jawab mengiringnya, yang menuntut kemampuan seluruh aparatur pemerintah daerah di dalam penguasaan substansi dan manajemen pembangunan. Dalam hal ini, perlu diperhatikan unsur yang amat penting dalam upaya meningkatkan otonomi daerah, yaitu kemantapan kelembagaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparatur pemerintah, serta kemampuan keuangan daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri (Kartasmita, 1996).

Manfaat otonomi daerah itu sendiri menurut Machfud Siddik adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan pusat pengambilan keputusan (*decongestion*). Apabila semua masalah diletakkan di tangan seseorang atau sekelompok pengambilan keputusan saja, maka dapat dipahami akan terjadi pengumpulan wewenang pada satu pusat pengambilan keputusan.
2. Kecepatan dalam pengambilan keputusan (*speed*). Suatu masalah tidak perlu diputuskan oleh satu pusat pengambil keputusan saja, tetapi pengambilan keputusan ini dapat di-

laksanakan dengan lebih cepat. Apalagi di negara sedang berkembang, dimana transportasi dan komunikasi tidak selalu lancar maka penyebaran wewenang kepada lebih dari satu pusat pengambilan keputusan akan mempercepat pengambilan keputusan.

3. Pengambilan keputusan yang realistis (*economic and social realism*). Dikarenakan pengambilan keputusan dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing, maka keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Hal ini dapat memperlancar pembangunan di daerah-daerah dan kebutuhan di daerah tersebut dapat segera terpenuhi.

METODE

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP merupakan alat analisis untuk melihat deskripsi kegiatan atau sektor ekonomi yang potensial berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonomi wilayah baik eksternal maupun internal (Yusuf, 1999).

Model analisis ini diturunkan dari persamaan awal komponen utama dalam analisis *Shift and Share* yaitu *Differential Shift* dan *Proportionality Shift*. Secara matematis *Differential Shift* dapat ditulis sebagai berikut:

$$D_{ij} = \left[\frac{\Delta E_{ij}}{E_{ij(t)}} - \frac{E_{IR}}{E_{IR(t)}} \right] E_{ij(t)} \quad (1)$$

dan *Proportionality Shift* dapat ditulis secara matematis sebagai berikut:

$$P_{ij} = \left[\frac{\Delta E_{IR}}{E_{IR(t)}} - \frac{\Delta E_R}{E_{R(t)}} \right] E_{ij(t)} \quad (2)$$

Sehingga dari persamaan di atas diperoleh rumus-rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\Delta E_{IR} = E_{IR(t+n)} - E_{IR(t)} \quad (3)$$

$$\Delta E_R = E_{R(t+n)} - E_{R(t)} \quad (4)$$

Keterangan; ΔE_{ij} adalah perubahan pendapatan kegiatan i di wilayah studi pada periode waktu t dan t+n; ΔE_{IR} adalah perubahan pendapatan kegiatan i di wilayah referensi; ΔE_R adalah perubahan PDRB di wilayah referensi; E_{ij} adalah pendapatan kegiatan i di wilayah studi; E_{IR} adalah pendapatan kegiatan i di wilayah referensi; E_R adalah PDRB di wilayah referensi, t+n adalah tahun antara dua periode.

Pendekatan analisis MRP ini dibagi menjadi dua rasio, yaitu: (1) rasio pertumbuhan wilayah referensi (RP_R) dan (2) rasio pertumbuhan wilayah studi (RP_S).

(1) Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RP_R). RP_R adalah perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan kegiatan i di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) wilayah referensi.

$$RP_R = \frac{\Delta E_{iR} / E_{iR}(t)}{\Delta E_R / E_R(t)} \quad (5)$$

Keterangan; ΔE_{iR} adalah perubahan pendapatan kegiatan i di wilayah referensi, $E_{iR}(t)$ adalah pendapatan kegiatan i awal periode penelitian di wilayah referensi, ΔE_R adalah perubahan PDRB di wilayah referensi; $E_{R(t)}$ adalah PDRB pada awal penelitian wilayah referensi.

Jika nilai $RP_R > 1$ positif (+), artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam wilayah referensi lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB total wilayah referensi.

Jika nilai $RP_R < 1$ negatif (-), artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam wilayah referensi lebih kecil dari pertumbuhan PDRB total wilayah referensi.

(2) Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RP_S). RP_S adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan i wilayah studi dengan laju pertumbuhan kegiatan i wilayah referensi.

$$RP_S = \frac{\Delta E_{ij} / E_{ij}(t)}{\Delta E_{iR} / E_{iR}(t)} \quad (6)$$

Keterangan; ΔE_{ij} adalah perubahan pendapatan kegiatan i di wilayah studi, $E_{ij}(t)$ adalah pendapatan kegiatan i pada awal periode penelitian wilayah studi, ΔE_{iR} adalah perubahan pendapatan kegiatan i di wilayah referensi, $E_{iR}(t)$ adalah pendapatan kegiatan i awal periode penelitian di wilayah referensi.

Jika nilai $RP_S > 1$ positif (+), artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pada tingkat wilayah studi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pada wilayah referensi.

Jika nilai $RP_S < 1$ negatif (-), artinya pertumbuhan suatu sektor pada tingkat wilayah studi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor tersebut pada wilayah referensi.

Hasil dari analisis MRP ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Klasifikasi 1, yaitu nilai RP_R (+) dan RP_S (+) berarti kegiatan tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan yang menonjol dan demikian pula pada tingkat kabupaten. Kegiatan ini selanjutnya disebut dominan pertumbuhan.

Klasifikasi 2, yaitu nilai RP_R (+) dan RP_S (-) berarti kegiatan tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan menonjol, namun pada tingkat kabupaten belum menonjol.

Klasifikasi 3, yaitu nilai RP_R (-) dan RP_S (+) berarti kegiatan tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan tidak menonjol.

jol sementara pada tingkat kabupaten termasuk menonjol.

Klasifikasi 4, yaitu nilai RP_R (-) dan RP_s (-) berarti kegiatan tersebut pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan rendah.

Analisis Shift Share

Analisis *Shift share* merupakan teknik dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebagai perubahan atau peningkatan suatu indikator pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktifitas kerja perekonomian daerah dibandingkan dengan perekonomian di tingkat regional atau nasional.

Analisis *Shift share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel daerah, seperti jumlah tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau output selama waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh pertumbuhan nasional (N), bauran industri/*industry mix* (M) dan keunggulan kompetitif (C). Pengaruh pertumbuhan nasional disebut *proposional shift* atau bauran komposisi, dan pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan *differential shift* atau *regional share* (Soepono, 1993). Persamaan dan komponen-komponen dalam analisis *shift share* sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad (7)$$

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah:

$$D_{ij} = E^*_{ij} - E_{ij} \quad (8)$$

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot r_n \quad (9)$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n) \quad (10)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_n) \quad (11)$$

dimana: r_{ij} , r_{in} , dan r_n mewakili laju pertum-

buhan wilayah kabupaten dan laju pertumbuhan wilayah provinsi yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = \frac{(E^*_{ij} - E_{ij})}{E_{ij}} \quad (12)$$

$$r_{in} = \frac{(E^*_{in} - E_{in})}{E_{in}} \quad (13)$$

$$r_n = \frac{(E^*_{n} - E_n)}{E_n} \quad (14)$$

Keterangan; E_{ij} adalah pendapatan sektor i di wilayah j (kabupaten), E_{in} adalah pendapatan sektor i di wilayah n (provinsi), E_n adalah pendapatan wilayah n (provinsi), E^*_{ij} adalah pendapatan tahun terakhir, r_{ij} adalah laju pertumbuhan sektor i di wilayah j (kabupaten), r_{in} adalah laju pertumbuhan sektor i di wilayah n (provinsi), r_n adalah laju pertumbuhan pendapatan di wilayah n (provinsi)

Sehingga didapat persamaan *Shift share* untuk sektor i di wilayah j (Soepono, 1993) sebagai berikut:

$$D_{ij} = E_{ij} \cdot r_n + E_{ij}(r_{in} - r_n) + E_{ij}(r_{ij} - r_n) \quad (15)$$

Keterangan; D_{ij} adalah perubahan variabel *output* sektor i di wilayah j , N_{ij} adalah pertumbuhan ekonomi nasional, M_{ij} adalah bauran industri sektor i di wilayah j , C_{ij} adalah keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j , E_{ij} adalah pendapatan sektor i di wilayah j ,

Adapun dari rumus di atas diketahui ada 2 indikator dari hasil perhitungan *Shift share* dalam perekonomian suatu daerah, yaitu:

Jika nilai dari komponen pergeseran proporsional dari sektor >0 , maka sektor yang bersangkutan mengalami pertumbuhan yang cepat dan memberikan pengaruh yang positif kepada perekonomian daerah, begitu juga sebaliknya.

Jika nilai komponen pergeseran diferen-

sial suatu sektor <0, maka keunggulan komparatif dari sektor tersebut meningkat dalam perekonomian yang lebih tinggi, begitu juga sebaliknya.

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi suatu wilayah terutama dari kriteria kontribusi. Alat analisis ini juga dipakai untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Perhitungan basis tersebut menggunakan variabel PDRB wilayah atas suatu kegiatan dalam struktur ekonomi wilayah. Rumus menghitung LQ (Arsyad, 1999) adalah:

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt} \quad (16)$$

Keterangan: LQ adalah koefisien *Location Quotient*, v_i adalah pendapatan sektor i di suatu daerah, v_t adalah pendapatan total daerah tersebut, V_i adalah pendapatan sektor i secara regional/nasional, V_t adalah pendapatan total regional/nasional

Dari rumus di atas ada 3 kategori hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) dalam perekonomian daerah, yaitu:

Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi lebih berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Artinya, sektor tersebut dalam perekonomian daerah di wilayah studi memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai sektor basis.

Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Sektor tersebut dikategorikan sebagai

sektor nonbasis.

Jika nilai $LQ = 1$, maka sektor yang bersangkutan baik di wilayah studi maupun di wilayah referensi memiliki peningkatan.

Analisis Overlay

Analisis *Overlay* ini dimaksudkan untuk menentukan sektor atau kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi dengan mengabungkan hasil dari Metode Rasio Pertumbuhan (MRP) dan metode *Location Quotient* (LQ). Metode ini mempunyai 4 (empat) penilaian atau kemungkinan, yaitu:

Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi.

Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-) menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini perlu lebih ditingkatkan kontribusinya untuk menjadi kegiatan yang dominan.

Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+) menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar. Kegiatan ini sangat memungkinkan bahwa kegiatan sedang mengalami penurunan.

Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-) menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun dari kontribusi.

Analisis Klassen Typology

Analisis *Klassen Typology* digunakan untuk melihat gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan daerah ini, dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospek pertum-

buhan ekonomi daerah pada masa mendatang. Selain itu, hal tersebut juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan daerah.

Menurut Tipologi daerah, daerah dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu:

Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah.

Daerah maju tapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata.

Daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan, tetapi tingkat perkapita lebih rendah dari rata-rata.

Daerah Relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang rendah.

Dalam analisis terdapat empat klasifikasi sektor-sektor ekonomi yang mempunyai karakteristik yang berbeda yaitu, sektor tumbuh cepat (*rapid growth sector*), sektor tertekan (*retarded sector*), sektor sedang tumbuh (*growing sector*), sektor relatif tertinggal (*relatively backward sector*) yang dapat dilihat pada Tabel 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP merupakan alat analisis untuk melihat deskripsi kegiatan atau sektor ekonomi yang potensial berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonomi wilayah baik eksternal maupun internal. Model analisis ini diturunkan dari persamaan awal komponen utama dalam analisis *Shift Share* yaitu *Differential Shift* dan *Proportionality Shift*. Dalam analisis ini terdapat dua jenis rasio pertumbuhan yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RP_R) yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RP_S) yaitu kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tabel 2 menyajikan hasil perhitungan dan analisis MRP kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melihat deskripsi kegiatan atau sektor ekonomi terutama struktur ekonomi di wilayah ini.

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang mempunyai nilai RP_R positif (+) dan nilai RP_S positif (+) yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Hal ini berarti pada periode tahun 2003-2007, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan merupakan sektor yang potensial baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabu-

Tabel 1. Klasifikasi Sektor Ekonomi menurut *Klassen Typology*

	y	$y_i > y$	$y_i < y$
r			
$r_i > r$		Sektor maju dan tumbuh cepat	Sektor berkembang cepat
$r_i < r$		Sektor maju tetapi tertekan	Sektor relatif tertinggal

Sumber: Syafrizal (1997)

Keterangan: r_i adalah laju pertumbuhan sektor i, r adalah laju pertumbuhan PDRB, y_i adalah kontribusi sektor i terhadap PDRB, y adalah kontribusi rata-rata sektor terhadap PDRB

Tabel 2. Hasil Perhitungan MRP Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2003-2007

Sektor	RPR		RPS	
	Riil	Nominal	Riil	Nominal
1. Pertanian	1,236	+	1,015	+
2. Pertambangan & Penggalian	0,056	-	0,225	-
3. Industri Pengolahan	1,091	+	1,132	+
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,261	+	0,615	-
5. Bangunan	1,562	+	0,72	-
6. Perdagangan, Restoran & Hotel	1,46	+	0,794	-
7. Pengangkutan & Komunikasi	2,253	+	0,474	-
8. Keu. Persewaan & Jasa Perusahaan	1,492	+	0,481	-
9. Jasa-jasa	1,28	+	0,825	-

Sumber: BPS Kabupaten OKI (data diolah)

paten karena mempunyai pertumbuhan yang menonjol dari sektor ekonomi yang lain.

Sedangkan hanya *sektor pertambangan dan penggalian* yang mempunyai pertumbuhan rendah baik di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Sektor-sektor lainnya seperti *sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, restoran dan hotel, Sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan*, mempunyai nilai RPR positif dan nilai RPS negatif berarti sektor-sektor tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan yang menonjol tetapi pada tingkat kabupaten belum menonjol.

Dari hasil analisis MRP dalam konteks kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut, menunjukkan bahwa *sektor pertanian dan sektor industri pengolahan* merupakan sektor yang dominan pertumbuhannya. Selain itu, sektor tersebut juga menunjukkan peningkatan terhadap struktur pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat sebagian besar penduduk di wilayah kabupaten OKI masih bergerak di bidang agraris, sehingga sektor pertanian mempunyai pertumbuhan yang menonjol dari sektor lainnya. Selain itu, sektor industri pengolahan juga mempunyai pertumbuhan yang menonjol yaitu salah satunya industri

pengolahan seperti industri pembuatan pempek dan kerupuk kemplang yang berkembang pesat di provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten OKI. Sehingga pembangunan di kedua sektor tersebut harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan.

Analisis Shift Share

Analisis *shift share* mempunyai tujuan untuk menentukan kinerja atau produktifitas kerja perekonomian daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Analisis juga digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebagai perubahan atau peningkatan suatu indikator pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Jika pertumbuhan di tingkat daerah atau regional menunjukkan perbedaan dengan pertumbuhan nasional yang dapat dilihat dari positif dan negatif dalam pergeseran PDRB dan secara total pergeseran terdiri dari pergeseran struktural serta pergeseran terhadap pembagian proporsional.

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan upaya dalam mengamati perubahan struktur ekonomi daerah atau regional.

Tabel 3. Perhitungan *Shift Share* kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2003-2007 (Juta Rupiah)

Sektor	2005				2006				2007			
	Nij	Mij	Cij	Dij	Nij	Mij	Cij	Dij	Nij	Mij	Cij	Dij
1	1213151	1262089	1423921	3899162	1293984	1605847	1892204	4792035	1377189	897793	815626	3090608
2	42241.17	-186532	-24410.2	-168701	43915.8	-212673	-54280.2	-223038	47178.2	-263555	75083.5	-141294
3	214594.2	-18967.4	86245.9	281873	227033	21610.83	-66720.9	181923	241009	-34324	-150602	56083.2
4	1474.165	2692.831	-1868.62	2298.38	1527.8	3489.215	-2375.56	2641.45	1601.16	2509.92	-1624.4	2486.7
5	333759.2	926244	137831	1397835	354069	725596.6	313145.3	1392811	374885	850632	15491.5	1241009
6	416028.2	1205824	226255	1848106	439100	1200090	151483.5	1790673	468923	1502891	447377	2419191
7	31205.17	209791.2	17194.3	258191	32854.8	176082.6	2827.125	211765	35189.2	298515	44625.4	378330
8	63306.17	160325.6	-103838	119794	65736.8	200896.6	-89472	177161	69480.2	229123	-9934.2	288669
9	186493.2	351576.2	12969.4	551039	195559	528125.8	-66404.4	657280	212008	683238	545642	1440888
PDRB	2502252	3913043	1774300	8189595	2653779	4249065	2080406	8983251	2827463	4166824	1781685	8775972

Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten OKI (data diolah)

Keterangan: Nij adalah Komponen Pertumbuhan Nasional, Mij adalah Komponen Bauran Industri, Cij adalah Komponen Keunggulan Kompetitif, Dij adalah Komponen Pertumbuhan Daerah

Dampak dari perubahan PDRB tersebut yang dalam perhitungannya berubah sesuai dengan tipe dari PDRB dalam subsektor tertentu termasuk laju pertumbuhan nasional yang cepat atau lambat. Oleh karena itu, dengan tujuan untuk mengamati pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pergeseran perekonomian dalam hal ini perkembangan sektor-sektor ekonomi kabupaten Ogan Komering Ilir dalam kurun waktu antara tahun 2003-2007, maka digunakan analisis *shift share* ini.

Tabel 3 menyajikan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis *shift-share* di atas, terlihat bahwa pada tahun 2007 sektor yang memiliki pengaruh keunggulan kompetitif (Cij) adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, restoran dan hotel, dan sektor jasa-jasa. Selain itu, sektor yang juga mengalami peningkatan pengaruh keunggulan kompetitif adalah sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan hasil analisis *shift-share* pada tahun 2007 secara keseluruhan dengan melihat pengaruh keunggulan kompetitif pada PDRB menunjukkan penurunan bila dibandingkan tahun 2006, tetapi secara keseluruhan semua sektor ekonomi mengalami perubahan yang positif pada PDRB di wilayah kabupaten OKI.

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan. Metode analisis ini juga dipakai untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Perhitungan basis tersebut menggunakan variabel PDRB wilayah atas suatu kegiatan dalam struktur ekonomi wilayah.

Apabila sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari satu menunjukkan bahwa peranan sektor ekonomi cukup menonjol di daerah tersebut dan sektor tersebut mampu mengekspor sebagian dari nilai tambah yang dihasilkan. Sebaliknya, apabila sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari satu hanya mampu memenuhi pasar dalam negeri atau lokal daerah dan cenderung mengimpor dari wilayah lain.

Berdasarkan Tabel 4 yang menyajikan hasil perhitungan LQ, dapat diketahui ada sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ yaitu Sektor Pertanian, Sektor Bangunan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta Sektor Jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis yang memiliki peranan penting dalam perekonomian kabupaten OKI yang ditun-

Tabel 4. Koefisien Location Quotient (LQ) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2003-2007

Sektor	2003	2004	2005	2006	2007	Rerata LQ
1. Pertanian	2.4935	2.4692	2.454	2.4393	2.42174	2.4555
2. Pertambangan & Penggalian	0.0593	0.0610	0.0629	0.0646	0.06876	0.0633
3. Industri Pengolahan	0.4831	0.4807	0.4833	0.4817	0.48058	0.4819
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0.1352	0.1315	0.1268	0.1213	0.1176	0.1265
5. Bangunan	1.9739	1.9017	1.8462	1.8114	1.76233	1.8591
6. Perdagangan, Restoran & Hotel	1.3417	1.3219	1.2835	1.245	1.21117	1.2806
7. Pengangkutan & Komunikasi	0.3542	0.3293	0.3088	0.2917	0.27144	0.3111
8. Keu. Persewaan & Jasa Perusahaan	0.7401	0.7078	0.6752	0.6425	0.618070	0.6767
9. Jasa-jasa	1.0743	1.0593	1.0336	0.9964	0.9839	1.0295

Sumber: BPS Kabupaten OKI (data diolah)

jukkan dengan nilai koefisien LQ lebih dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan di wilayah kabupaten OKI dan cenderung mampu untuk mengekspor ke wilayah lain.

Pada sektor Pertambangan & Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas & Air Bersih, sektor Pengangkutan & Komunikasi, serta sektor Keu. Persewaan & Jasa Perusahaan memiliki nilai koefisien $LQ < 1$, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor non basis dan cenderung akan mengimpor dari wilayah lain.

Hasil perhitungan analisis tersebut memperlihatkan bahwa sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari satu adalah Sektor Pertanian (rerata $LQ = 2,4555$), Sektor Bangunan (rerata $LQ = 1,8591$), Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (rerata $LQ = 1,2806$), serta Sektor Jasa-jasa (rerata $LQ = 1,0295$) sebagai sektor unggulan dan memiliki keunggulan komparatif. Oleh karena itu, sektor tersebut perlu diupayakan baik oleh pemerintah dan sektor swasta untuk lebih dikembangkan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian daerah di wilayah kabupaten OKI.

Analisis Overlay

Metode *overlay* dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan dan mengetahui sektor-sektor unggulan di kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggabungkan hasil dari metode Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan metode analisis LQ. Metode ini mempunyai penilaian terhadap sektor-sektor ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi.

Jika nilai $RP_s > 1$ yaitu positif (+), artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pada tingkat wilayah studi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pada wilayah referensi. Jika nilai $RP_s < 1$ yaitu negatif (-), artinya pertumbuhan suatu sektor pada tingkat wilayah studi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor tersebut pada wilayah referensi.

Sedangkan dari analisis LQ, jika nilai $LQ > 1$ yaitu positif (+) artinya menunjukkan sektor tersebut mempunyai kontribusi besar. Jika nilai $LQ < 1$ yaitu negatif (-) artinya sektor tersebut mempunyai kontribusi yang kecil.

Dari hasil perhitungan analisis *overlay* pada tahun 2003-2007 (Tabel 5) sektor ekonomi di kabupaten Ogan Komering Ilir baik

Tabel 5. Perhitungan Overlay Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2003-2007

Sektor	MRP (RP_s)		LQ	
	Riil	Nominal	Riil	Nominal
1. Pertanian	1,015	+	2.4555	+
2. Pertambangan & Penggalian	0,225	-	0.0633	-
3. Industri Pengolahan	1,132	+	0.4819	-
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,615	-	0.1265	-
5. Bangunan	0,72	-	1.8591	+
6. Perdagangan, Restoran & Hotel	0,794	-	1.2806	+
7. Pengangkutan & Komunikasi	0,474	-	0.3111	-
8. Keu. Persewaan & Jasa Perusahaan	0,481	-	0.6767	-
9. Jasa-jasa	0,825	-	1.0295	+

Sumber: BPS Kabupaten OKI (data diolah)

Keterangan: MRP adalah Model Rasio Pertumbuhan, RP_s adalah Nilai Rasio Pertumbuhan wilayah Studi, LQ adalah Nilai koefisien *Location Quotient*

dari pertumbuhan maupun dari kontribusi yang diklasifikasikan sebagai berikut:

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan atau sangat dominan karena menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB dan pembangunan di kabupaten OKI.

Sektor industri pengolahan menunjukkan sektor yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Artinya, sektor ini perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan untuk menjadi sektor yang dominan.

Sektor bangunan; sektor perdagangan, restoran dan hotel dan sektor jasa-jasa menunjukkan sektor yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar. Hal ini sangat memungkinkan sektor tersebut merupakan sektor yang sedang mengalami penurunan yang salah satunya disebabkan oleh kurang tersedianya lapangan kerja.

Sedangkan keempat sektor lainnya, antara lain sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor

pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang tidak potensial baik dari segi pertumbuhan maupun dari kontribusi.

Analisis *Klassen Typology*

Analisis ini digunakan untuk melihat gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Dalam analisis ini terdapat empat klasifikasi sektor-sektor ekonomi yang mempunyai karakteristik yang berbeda yaitu, sektor maju atau tumbuh cepat (*rapid growth sector*), sektor potensial atau tertekan tapi maju (*retarded sector*), sektor berkembang atau sedang tumbuh (*growing sector*), sektor relatif tertinggal (*relatively backward sector*).

Adanya analisis *Klassen Typology* ini maka sektor-sektor yang termasuk dalam kelompok tersebut dapat dilihat dari Tabel 6.

Dari hasil perhitungan pada Tabel 6 tampak terlihat subsektor maju adalah *sektor per-*

Tabel 6. Klasifikasi Sektor Ekonomi menurut *Klassen Typology* Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tahun 2003-2007

Proporsi Pertumbuhan	$\frac{X_i}{\bar{X}} \geq 1$	$\frac{X_i}{\bar{X}} \leq 1$
$\frac{\Delta X_i}{\Delta X} \geq 1$	Subsektor Maju: Pertanian (1,06 dan 2,45)	Subsektor Berkembang: Industri Pengolahan (1,04 dan 0,48)
$\frac{\Delta X_i}{\Delta X} \leq 1$	Subsektor Potensial: Bangunan (0,94 dan 1,85) Perdagangan, Hotel dan Restoran (0,98 dan 1,28) Jasa-jasa (0,9 dan 1,02)	Subsektor Tertinggal: Pertambangan dan Penggalian (0,81 dan 0,06) Listrik, Gas dan Air Bersih (0,64 dan 0,12) Pengangkutan dan Komunikasi (0,91 dan 0,31) Keuang, Persewaan dan Jasa Perusahaan (0,62 dan 0,67)

Sumber: Syafrizal (1997)

tanian (1,06 dan 2,45) yang di masa mendatang akan menjadi sektor yang terus berkembang. Subsektor berkembang yaitu *sektor industri pengolahan* (1,04 dan 0,48) yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi pengembangan yang besar tetapi belum diolah sepenuhnya dengan baik.

Subsektor potensial terdiri dari *sektor bangunan* (0,94 dan 1,85); *perdagangan, hotel dan restoran* (0,98 dan 1,28) dan *sektor jasa-jasa* (0,9 dan 1,02). Sedangkan subsektor tertinggal adalah *sektor pertambangan dan penggalian* (0,81 dan 0,06); *listrik, gas dan air bersih* (0,64 dan 0,12); *pengangkutan dan komunikasi* (0,91 dan 0,31); serta *sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan* (0,62 dan 0,67).

KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan analisis di atas, dapat dilihat sektor ekonomi di kabupaten Ogan Komering Ilir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan atau sangat dominan karena menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB dan pembangunan di kabupaten OKI. *Sektor industri pengolahan* menunjukkan sektor yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Artinya, sektor ini perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan untuk menjadi sektor yang dominan. *Sektor bangunan; sektor perdagangan, restoran dan hotel dan sektor jasa-jasa* menunjukkan sektor yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar. Hal ini sangat memungkinkan sektor tersebut merupakan sektor yang sedang mengalami penurunan yang salah satunya disebabkan oleh kurang tersedianya lapangan kerja. Empat sektor lainnya, antara lain *sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi*

serta *sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan* merupakan sektor yang tidak potensial baik dari segi pertumbuhan maupun dari kontribusi.

Saran penulis dari penelitian ini adalah: diharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya atau potensi daerah terutama dalam bidang pengembangan UKM untuk lebih meningkatkan penciptaan kesempatan kerja di masing-masing sektor ekonomi yang ada untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Penerapan kebijakan pembangunan daerah yang diambil oleh pemerintah daerah dan lembaga pemerintahan di lingkungan daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam mencapai pemerataan hasil-hasil pembangunan ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 4, Cetakan Pertama, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik, 2007, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha*, kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Boediono, 1992, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Bulletin Statistik, 2008, *Laporan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha*, Kabupaten Ogan Komering Ilir: BPS.
- Conyers, Diana and Peter Hills, 1994, *An Introduction to Development Planning in the Third World*, New York: John Wiley & Son.

- Emilia, dan Imelia., 2006, *Ekonomi Regional, Modul Ilmu Ekonomi*, Jambi: SP4 FE UNJ.
- Jhingan, M.L., 1996, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Edisi Keenam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, Ginandjar., 1996, *Pembangunan untuk Rakyat*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Kuncoro, Mudrajad., 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ma'ruf, Ahmad., 2003, "Penentuan Sektor Unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Volume 4, No.1.
- Soepono, Prasetyo, 1993, "Analisis Shift-Share, Perkembangan dan Penerapan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume VIII, No.1.
- Suharsih, S., dan Akhmad Syarifuddin., 2003, "Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Menggunakan Beberapa Alat Analisis Alternatif: Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada PELITA VI", *Jurnal KOMPAK*, No.9, September, Hal. 445-458.
- Suparmoko, 1990, *Keuangan Negara*, Yogyakarta: BPFE.
- Suprpto, Liling Joko, 2007, "Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Basis Ekonomi Provinsi DI Yogyakarta Tahun 1998-2004 (Implementasi Pelaksanaan Otonomi Daerah)", *Jurnal Elektronik UNS*.
- Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suwandi, I Made, 2000, *Agenda Strategis Penataan Otonomi Daerah*, Jakarta.
- Syafrizal, 1997, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Jakarta: Prisma.
- Tarigan, R., 2007, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Jakarta: Bumi Aksara.
- www.bappenass.go.id diakses tanggal 10 Oktober 2009.
- www.bps.go.id diakses tanggal 12 Oktober 2009
- www.bps-sumsel.go.id diakses tanggal 12 Oktober 2009
- www.kaboki.go.id diakses tanggal 10 Oktober 2009
- Yusuf, Maulana., 1999, "Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Volume XLVII, No.2.